BAB II

KERANGKA ANALISA FENOMENA TENAGA KERRJA INDONESIA ILEGAL PERSPEKTIF JAMS S. COLEMAN

A. Penulisan Terdahulu

Penulisan terdahulu perlu disajikan di sini supaya Penulis bisa melihat letak perbedaan Penulisannya dengan Penulisan-Penulisan sebelumnya. Letak perbedaannya yaitu pada objek Penulisan, fokus Penulisan yang terdapat pada rumusan masalah serta hasil dari Penulisan ini, lebih jelasnya Penulis sajikan dibawah ini:

1. Penulisan tentang TKI pernah dilakukan sebelumnya oleh Abd Hanan Magrobi, jurusan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember 2014, dengan judul "*Pemamfaatan Remitten Dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Kabupaten Jember"* fokus dari Penulisan tersebut adalah tentang peningkayan status sosial dalam keluarga TKI, membahas tentang pemanfaatan remitten dan peningka tan status sosial ekonomi keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI). Tujuan dari Penulisan ini untuk mengetahui pemanfaatan remitten yang dikirimkan kepada keluarga TKI.

   Tentu berbeda jauh dengan Penulisan yang akan saya garap fokusnya pada fenomena tenaga kerja ILegal bukan pada statsu sosialnya, apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Gadu Barat memilih menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga kerja Indonesia ILegal di luar negerit, dan hasil yang ingin Penulis dapatkan disini adalah tentang apa yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut.

2. Yang kedua adalah skripsi yang berjudul *"perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri menurut undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia"* yang ditulis oleh "*SunarwoSukowati"* Jurusan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2011.

   Penulisan ini tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang diatur dalam undang-undang negara, adapun salah satu rumusan masalahnya adalah "Bagaimana perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri menurut peraturan perundang-undangan yang di lakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah?" disini yang inigin didapat Penulis adalah seperti apa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para TKI, apakah sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang No. 39 tahun 2014 atau malah jauh dari yang diharapkan oleh para TKI.

   Sedangkan Penulisan saya disini salah satu rumusan masalahnya adalah *Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Gadu Barat memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)? Dan mengapa mereka memilih jalur ILegal?* Jika Penulis terdahulu ingin mengetahui tentang perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan pemerintah maka disini saya lebih memfokuskan pada kondisi ekonomi para TKI-nya.

1. Yang ketiga adalah karya *ilmiah* yang ditulis oleh *faradillah imanda* dengan judul "*Determinan Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Mantan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Desa Purwo Asri Kecamatan Tegal Dlimo Kabupaten Banyuwangi"* Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari determinan kesejahteraan ekonomi rumah tangga mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diman faktor yang menentukan kesejehateraan ekonomi rumah tangga mantan TKI adalah pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, lama menjadi TKI dan pendidikan.

   Dalam pengukuran kesejahteraan digunakan jumlah total pengeluaran konsusmsi baik konsumsi makanan maupun konsumsi non makan dalam satu bulan yang dikeluarga oleh responden yang berada di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Jika Penulisan diatas terfokus pada kesejahteraan ekonomi rumah tangga mantan TKI, maka Penulisan saya lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menjadi TKI ketimbang berkerja di daerahnya.

2. *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mantan TKI Di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep Untuk Bekerja Kembali Ke Luar Negeri"* skripsi ini ditulis oleh "Nur Fawaid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(090810101025)" *mahasiswa* Universitas Jember Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Tahun 2016.

Fokus dari skripsi ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat kecamatan arjasa untuk bekerja kembali keluar negeri, artinya objek Penulisannya adalah mereka yang pernah berpengalaman menjadi TKI di luar negeri. Apa yang mempengaruhi mereka sehingga berkeinginan untuk kembali bekerja ke luar negeri atau menjadi TKI, beberapa faktor yang ditulias oleh "Nur Fawaid" dalam skripsinya ini antara lain adalah: faktor ekonomi, faktor keluarga, lingkungan dan pendidikan. Berbeda dengan skripsi yang saya teliti disini, karena Penulisan saya ini lebih terfokus pada apa yang melatar belakangi Masyarakat Desa Gadu Barat Kecamaan Ganding Kabupaten Sumenep memilih menjadi TKI ILegal ke luar negeri. Saya mencoba mencari jawaban yang riel mengapa Masyarakat Desa Gadu Barat memilih meninggalkan lahan pertaniannya dan menjadi TKI, juga seperti apa peran pemerintah sekitar dalam mensosialisasikan pentingnya menggunakan jalur resmi/Legal dalam pemberangkatan menjadi TKI.

B. TINJAUAN TENTANG FENOMENA TENAGA KERJA INDONESIA

Kajian pustaka adalah telaah yang dilakukan dengan sumber buku-buku, koran, jurnal dan surat kabar lainnya.

1. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 ayat (2) UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah: “setiap orang laki-laki ataupun perempuan yang sedang atau dalam akan melakukan pekerjaan, baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Pendapat lain menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki persamaan dengan buruh. Buruh adalah orang yang bekerja dengan mendapat imbalan atau upah gaji. Pasal 1 ayat 3 UU No. 13 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa “buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan keluar negeri.[1]

Haris mengemukakan tenaga kerja dalam konteks yang lebih luas dikaitkan dengan mobilitas (migrasi), didefinisikan sebagai suatu aktifitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perpindahan tempat tinggal dan biasanya melakukan migrasi formal. Migrasi ini kecuali dilakukan ke negara negara terdekat, banyak diantara TKI/TKW juga dikirim ke negara-negara Teluk atau negara-negara industri maju, baik Asia maupun Eropa. Migrasi angkatan tenaga kerja ke luar negeri pada awalnya dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yang mendapat sebutan sebagai TKI adalah laki-laki. Namun, hal

[1]Undang-undang 2004 “*TentangKetenagaKerjaan*” (Bandung: Citra Umbara 2004), 3 no.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Ketika muncul angkatan kerja wanita ke luar negeri, maka muncullah istilah baru yang disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Penulisan ini, tenaga kerja Indonesia yang dimaksud adalah tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan asal Desa Karangrowo yang hendak bekerja menjadi TKI/TKW ke luar negeri sebagai pekerja kasar dan pembantu rumah tangga/pekerja domestik.[2]

Pemerintah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 2004 yang artinya pemerintah Indonesia memberi kesempatan pada warganya untuk bekerja keluar negeri untuk dapat mensejahterakan keluarga dalam kehidupannya. Dapat bekerja keluar negara merupakan hak warga sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberi kesempatan pada warga bekerja di negara lain, ini termuat dalam pasal 39 ayat 1 UU. No. 13 Tahun 2003, dengan bunyinya sebagai berikut: "pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja".[3]

Namun jauh-jauh hari sebelum adanya Undang-Undang diatas masyarakat Indonesia memang sudah gemar melakukan migrasi, mencari peerjaan di luar negeri bahkan mereka terkadang berbondong-bondong dalam kelompok untuk menjadi migran.

---

[2] Abdul Haris. Kucuran *Keringat dan Derap Pembangunan* "Jejak Migran dalam Pembangunan Daerah" (Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2003), 12

[3]Darwan.*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.(Bandung : PT Citra ditya Bakti 2000), 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Migrasi merupakan sebuah fenomena tradisi yang terjadi di seluruh pelosok dunia, termasuk di Indonesia, adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melampaui batas politik / negara ataupun batas administrasi / batas bagian dalam suatu negara. Migrasi terbagi atas dua kategori yaitu migrasi dalam negeri (intern), dan migrasi internasional. Migran masuk dan migran keluar adalah mereka yang masuk ke dalam atau keluar dari suatu populasi penduduk tertentu selama periode waktu tertentu. Migrasi internasional adalah seseorang yang melintasi perbatasan negara dapat melakukannya dengan ikut perpindahan masal (perpindahan sejumlah penduduk dengan ciri-ciri etnis atau sosial yang sama), atau sebagai pribadi, atau anggota kelompok keluarga kecil. Migrasi internasional dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Migrasi internasional menjadi salah satu pilihan penduduk Indonesia untuk mencari mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan serta perekonomian keluarga. Migrasi internasional yang dilakukan oleh penduduk di Indonesia banyak dijalankan secara kultural / swadaya. Mereka bermigrasi secara kultural atau swadaya dengan kemauan, keinginan, dan biaya sendiri. Migrasi internasional secara kultural sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan sebelum wujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dari sebelum dan sesudah zaman kejayaan kerajaan yang ada di Nusantara. Sejarah mencatat, basis budaya maritim di Nusantara mengantarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai etnis seperti Bugis, Bawean, Sasak, Aceh, Melayu, Madura, dan Flores untuk menentang ganasnya lautan menuju tanah pengharapan terutama di sub kontinen Asia Tenggara. Aktivitas perdagangan antarpulau dan internasional terutama di beberapa pelabuhan penting di Nusantara semakin meningkatkan mobilitas penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan.[4]

Permasalahan kependudukan di Indonesia merupakan masalah yang serius dan perlu segera penanganan. Terdapat 5 aspek masalah kependudukan yaitu: masalah kelahiran, kematian, migrasi, sumber daya manusia yang tergolong rendah, dan masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan secara umum terjadi karena ketimpangan pasar tenaga kerja, yakni pencari kerja lebih banyak dibanding kesempatan kerja yang ada, akibatnya terjadi pengangguran. Terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, salah satunya menyebabkan sebagian tenaga kerja bekerja di luar negeri, menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pada umumnya TKI yang bekerja di luar negeri dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi, maka pemikiran para TKI bermuara pada remitansi yang besar. Disinilah ada rasionalitas calon TKI memilih negara tujuan tempat bekerja yang memiliki standar upah tinggi, dengan biaya keberangkatan yang serendah mungkin.

[4]Djumialdji.*Perjanjian Kerja*, (Jakarta : Bumi Aksara. 1997), 21-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bekerianya TKI di luar negeri mimiliki kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi negara yang ditempati. Menarik untuk dicatit, tinggnya tingkat pertumbuhan ekonomi mereka justru semakin deras menyerap tenaga kerja asal hrdonesia. Sementara itu, besarnya jumlah penduduk serta relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya surplus tenaga kerja di dalam negeri. Hal mengakibatkan terjadinya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Negara-negara maju di Asia dan timur tengah seperti Jepang, Taiwan Korea Selatan Hongkong, Singapura, Brunei Darussalam, arab saudi, qatar, bahkan negara berkembang seperti malaysia memiliki jumlah penduduk yang sedikit dan pertumbuhan penduduk yang rendah namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara-negara tersebut mengalami kekurangan tenaga kerja dan memutuskan untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja dari negara lain, termasuk Indonesia.[5]

Besarnya mobilitas pekerja secara internasional memberikan setidaknya dua keuntungan. Pertama menekan angka Pengangguran di dalam negeri. Kedua, tambahan devisa. Namun demikian, arus migrasi keluar yang terlampau besar juga menimbulkan dampak yang kurang menyenangkan, seperti hilangnya sebagian besar pekerja potensial dari daerah pertanian. Dari sisi pemanfaat pekerja migran dari luar negeri, kehadiran TKI juga bisa memiliki implikasi-implikasi sosial, ekonomi

[5]Darwis, *Peluang Tenaga Kerja di Luar Negeri "Kabupaten TulungAgung- Propinsi Jawa Timu"*, (Jurnal Ekonomi Lembaga Demograji FE-UI, Jakarta. 2004) Vol 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan politik. Mayoritas TKI adalah pekerja kasar, sementara penduduk negeri yang bersangkutan memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang cukup tinggi. Yang terjadi bukan hanya segregasi sosial tetapi iuga streotyping yang pada gilirannya mengkondisikan potensi konflik.

2. Tahapan dan macam-macam TKI

a. Tenaga kerja Indonesia Legal

Tenaga kerja Indonesia yang Legal adalah mereka yang telah terdaftar secara resmi/sah dan telah mengiluti pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan oleh pemerintah dengan mendapatkan sertifikat resmi dan lolos seleksi, baik sleksi kesehatan, umur, dan lainnya dan TKI Legal ini dengan otomatis mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena mereka tercantum secara resmi sebagai tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

Depnaker (Departemen Tenaga Kerja) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penyalur informasi kesempatan kerja yang ada di dalam dan di luar negeri. Lembaga ini juga menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja yang akan disalurkan. Pelatihan semacam itu juga diberikan oleh lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja swasta yang bernaung di bawah Depnaker dan atas pengawasan Depnaker. Lembaga-lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swasta ini pada dasarnya membantu calon tenaga kerja memperoleh pekerjaan dengan mengambil sedikit keuntungan dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh para calon tenaga kerja

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta) yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan memiliki izin dari menteri tenaga kerja, mitra usaha, dan pengguna jasa TKI. Calon tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah setiap warga negara Indonesia yanng memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan persyaratan yang ketat baik menyangkut badan pelaksana, persyaratannya, dan tahapan penyelenggaraannya. Hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja berjalan dengan baik, untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara selektif dan tidak menyulitkan tenaga kerja berjalan dengan baik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara selektif dan tidak menyulitkan tenaga kerja untuk menghindari kecenderungan proses secara ILegal, yang sangat merugikan pencari kerja sendiri maupun nama baik negara.

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Berdasarkan UU Republik Indonesia No.39 pasal 10 tahun 2004, bahwa penempatan TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana yang terdiri dari PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri.[6]

Untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri seseorang individu harus melalui prosedur yang telah di tetapkan oleh negara. Ketentuan ini untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI seperti obyek perdagangan manusia, kekerasan, perbudakan, kerja paksa, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang tidak

[6] Hidayana, M Irwan. *Migrasi Lintas Batas dan Sesualitas di Asia Tenggara*. Halaman (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan 2004) Vol 36, 15-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusiawi. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002. Kegiatan penempatan TKI ke luar negeri meliputi:

1. Pengurusan surat ijin pengerahan
2. Perekrutan dan sleksi
3. Pendidikan dan pelatihan kerja
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologis
5. Uji kompetensi
6. Pengurusan dokument
7. Pembekalan ahir pemberangkatan
8. Pemberangkatan[7]

Dalam hal perekrutan dan seleksi didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang tata cara perekrutan, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI, situasi dan kondisi dan resiko di negara tujuan, dan perlindungan bagi TKI. Perekrutan calon TKI dilakukan terhadap calon TKI yang memenuhi syarat antara lain berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat. Persyaratan ini penting untung menghindari

[7] Undang-undang 2004 "*tentangketenagakerjaan*" (Citra Umbara Bandung 2004), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, penipuan dan sebagainya yang sela ini sering menimpa TKI di luar negeri.

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi KTP, ijazah pendidikan, sertifikat kompetensi kerja, akte kelahiran, surat keterangan status perkawinan, surat keterangan suami atau isteri, izin orang tua atau wali, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan TKI, perjanjian kerja, surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri.[8]

b. Tenaga kerja Indonesia ILegal

Tenaga kerja Indonesia ILegal adalah lawan kalimat dari tenaga kerja Indonesia Legal. Tenaga kerja ILegal ini adalah orang/individu maupun masyarakat yang tidak tercatat ecara sah/resmi dari depnaker, dengan tidak mengikuti sleksi yang di berlakukan, memilih jalan yang simple dengan tarif yang murah namun tidak mendapatkan perlindungan yang resmi dari pemerintah karena tidak diatur dalam undang-undang negara.

[8]Hidayana, M Irwan. Migrasi Lintas Batas dan Sesualitas di Asia Tenggara. Halaman (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan 2004) Vol 36, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sempitnya lahan pekerjaan dalam negeri, murah dan mudahnya proses pengiriman, tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah, rendahnya gaji dalam negeri dan ketiadaan informasi/sosialisasi ke Desa-Desa tentang cara bekerja ke luar negeri, disebut-sebut sebagai penyebab maraknya praktek pengiriman tenaga kerja Indonesia dengan jalur ILegal/gelap.

Selama ini telah menjadi permasalahan klasik yang sering timbul, menyangkut Legalitas pengiriman TKI keluar neger. Banyak yang di pulangkan dari negara tempat mereka bekerja, misalnya di malaysia, tidak adanya dokument yang sah menjadi salah satu penyebab pengusiran TKI tersebut. Negara memiliki wewenang untuk mengirim dan mengembalikan mereka ke negara asalnya. Setiap orang yang akan masuk ke negara lain harus disertai dengan dokument yang sah, TKI yang tidak memiliki dokument yang sah ketika dan/atau selama berada di negara tujuan penempatan, dinamakan TKI dengan kondisi ILegal.[9]

Penyebab utama munculnya tenaga kerja yang berangkat secara gelap/ILegal antara lain biaya yang lebih murah dan proses yang relatif cepat. Tenaga kerja yang tifak berdokument resmi menjadi masalah serius karena rawannya perlindungan hukum bagi mereka. TKI dengan kondisi ILegal sering menapatkan perlakuan

[9] Kertonegoro, Sentanoe. *Migrasi Tenaga Kerja*. (Jakarta: Pustaka Agung1994), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak manusiawi, selain tidak diberikan tampat tinggal yang layak dan jatah makan yang kurang, padahal mereka bekerja dari pagi sampai malam, apalagi bagi mereka yang menjadi pembantu rumah tangga, mereka bekerja tanpa libur tujuh hari dalam seminggu. Mereka juga tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, sehingga apabila mereka sakit ataupun meninggal dunia, tidak ada jaminan biaya untuk pengobatan dan pengembalian jenazah ke Indonesia.[10]

Majikan di luar negeri lebih senang mempekerjakan tenaga kerja yang ILegal/tidak resmi karena upah yang lebih murah juga buruh migran/TKI ILegal ini dengan mudah bisa di eksploitasi oleh majikannya karena sang majikan tahu bahwa perlindungan kepada migran ILegal sangat minim.

3. Karakteristik Calon TKI

Rendahnya penyerapan tenaga kerja didalam negeri mendorong encari kerja memanfaatkan kesempatan kerja ke luar negeri Bekerja keluar negeri merupakan usaha untuk mengatasi problem tenaga kerja yang ada pada suatu daerah/negara. Alasan utama pengiriman tenaga keluar negeri adalah untuk mengatasi pengangguran dalam negeri, dimana angka terakhir menunjukan pengangguran di Indonesia sekitar 9,1 persen. Bilamana pengiriman tenaga kerja dihentikan, maka

[10] Ibid, hal 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangguran akan dapat meningkat sekitar 2 persen dari kondisi sebelumnya, yang menjadikan tambahan pengangguran berkisar 1 sampai 1,5 juta orang setiap tahunnya.[11]

Diatas itu semua tentu ada karakteristik-karakteristik dari para calon TKI yang menjadi landasan masyarakat untuk memantapkan niatnya menjadi buruh migran/tenaga kerja Indonesia baik dengan jalur Legal/resmi maupun jalur ILegal/gelap. Dan diantara karakteristik-karakteristik tersebut antara lain:

a. Umur

Ravenstein dalam "Hukum Migrasinya" menyatakan migrant biasanya adalah penduduk golongan muda/usia produktif. Pada usia ini mereka dianggap lebih mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dibandingkan dengan penduduk golongan tua. Beranjak dari pandangan tersebut hasil survey menemukan, calon TKI keluar negeri adalah rata-rata berumur diatas 20 tahun yang merupakan usia produktif.[12] Kalau saja didalam negeri cukup tersedia lapangan pekerjaan bagi usia muda ini, maka mereka mampu meningkatkan perekonomian bangsa.

b. Pendidikan

[11]Bachtiar Elfindri, *EkonomiKetenagakerjaan*, (University Pres 2004), 43-46

[12]Arf. Nasution, *Orang Indonesia di Malaysia Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar2001), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan mempunyai andil besar dalam kesuksesan seseorang, seseoang bisa akan lempar dari jalur persaingan ketika pendidikan mereka tertinggal jauh dari orang lain. Orang berpendidikan tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk hidup sukses dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Kareakteristik dari para TKI bisa kita lihat juga pada jenjang pendidikannya, mayoritas dari mereka hanyalah lulusan SD, SMP dan paling tinggi SMA, mereka tidak mempunyai skill menunjang untuk bersaing mencari kerja di dalam negeri apalagi saat ini rata-rata dari lapangan pekerjaan harus menyertakan ijazah pendidikan yang minimalnya adalah sarjana starata satu (S1). Akibat hal ini rata-rata dari mereka yang tidak mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi harus terlempar dari persaingan dan memilih menjadi buruh migran di luar negeri.

c. Ekonomi

Latar belakang kehidupan keluarga calon TKI lebih banyak dijadikan alasan untuk mengambil keputusan bekerja keluar negeri. Mayoritas dari para TKI adalah mereka golongan ekonomi menengah kebawah, bahkan kadang untuk berangkat ke negara tujuan mereka mereka harus rela menjual tanah, sawah mereka.[13]

[13] Ibid, hal 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor Pendorong Dan Resiko Yang Dihadap Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Proses migrasi itu terjadi apabila seseorang mengalami tekanan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikolog di tempat ia berada. Tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang lain mengatakan tidak. Selain itu, Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Apabila tempat yang satu dengan tempat yang lain tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi proses migrasi.[14]

Secara teoritis volume migrasi (internal/eksternal) paling sedikit ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, faktor politik yang meliputi birokrasi dan berbagai prosedur yang dilalui migran. Kedua, faktor ekonomi yang meliputi latar belakang ekonomi migran, biaya migrasi dan upah. Ketiga, aspek aksesibiliti termasuk aksesibilitas transportasi dan jarak migrasi. Diantara ketiga aspek tersebut, aspek ekonomi merupakan aspek yang paling menonjol pengaruhnya terhadap volume migrasi keluar. Tekanan ekonomi di daerah asal menyebabkan migran mencari solusi alternatif untuk tetap bertahan.[15]

---

[14] Masrufah Izza. Multidimensi *Kemiskinan*. (Surakarta: UNS Press 2009), 91

[15] Abdul Haris. *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan* "Jejak Migran dalam Pembangunan Daerah", (Yogyakarta: Pustaka pelajar 2003) 69-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga, ada faktor pendorong lainnya yang membuat volume buruh migran semakin lama semakin meningkat. Meskipun berbagai persoalan telah banyak dialami oleh TKI di luar negeri seperti yang banyak diberitakan di televisi, koran, maupun media lainnya, namun hal itu tidak mengurangi minat warga orang Indonesia khususnya masyarakat Desa Gadu Barat Ganding Sumenep untuk bekerja di luar negeri. Faktor samping lainnya tersebut, antara lain; peran jaringan migrasi (bujukan calo tenaga kerja), dukungan keluarga, serta lingkungan sekitar tempat tinggal berupa cerita, ajakan, dan keberhasilan tetangga yang pernah menjadi TKI/TKW. Faktor penarik bagi sebagian warga yang memutuskan bekerja ke luar negeri adalah adanya peluang kerja dengan gaji yang tinggi di negara tujuan migrasi dibandingkan dengan gaji yang diperoleh sebagai buruh tani di Desa.

Memperoleh hasil yaitu bekerja di luar negeri dapat berdampak terhadap pergeseran status sosial yaitu : pendapatan, penampilan, dan epemilikan. Penduduk yang ingin menjadi Buruh Migran mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan pendapatan yang lebih tinggi. Pergeseran status sosial para Buruh Migran yang pulang ke Indonesia dalam hal penampilan terutama TKW yaitu berupa cara berpakaian, gaya rambut, dan perhiasan, dalam hal sopan santun pun kadang menjadi berbeda seperti logat bicara, tingkah laku yang dulunya pemalu menjadi lebih berani. Sedangkan dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan mereka mempunyai perhiasan, kendaraan, rumah, tanah dan perabot rumah tangga.

Namun dismaping itu tak sedikit pula resiko yang harus di hadapi oleh para TKI/TKW di tempat meeka bekerja. Masalah-masalah yang sering dialami adalah :

a. Kekerasan-kekerasan yang sering mereka hadapi yaitu kekerasan fisik misalnya : penganiayaan yang dilakukan tidak memberi makan selama berhari-hari, pemukulan yang dilakukan menggunakan barang tumpul, dilukai dengan senjata tajam seperti pisau, silet dan ada juga yang disiram menggunakan air panas panas bahkan tubuhnya ada yang disetrika, tidak jarang insiden-insiden ini membuat nyawa mereka melayang.

b. Perkosaan, hal ini banyak terjadi di negara Arab Saudi dikeranakan pemikiran orang Arab bahwa mereka tidak menganggab pekerjanya sebagai buruh migran melainkan sebagai budak yang dapat digunakan semaumereka,

c. Pendeportasian, tidak digaji, dan penahanan dokumen itu adalah berbagai masalah yang dialami para TKI/TKW, apalagi mereka berangkat menggunakan jasa calo (tekong) yang tidak resmi, maka pemerintah tidak dapat membantu apabila terjadi masalah terhadap TKI/TKW tersebut. tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Masalah pribadi seperti perselingkuhan yang berakhir pada perceraian. Kenapa perceraian dikalangan TKI/TKW cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh kehidupan bebas yang dialami semasa bekerja diluar negeri sehingga lupa dengan pasangan yang ada dirumah, begitu pula yang dialami pasangan yang ada dirumah, merasa kebutuhan rohani yang lama tidak terpenuhi dan mempunyai banyak uang hasil kiriman dari luar negeri, maka mereka mencari hiburan di luar rumah dan menjadikanya kebiasaan, ketika pasangan kembali ke tanah air maka uang yang dikirim sudah tidak tersisa lagi, mengkibatkan memilih jalan untuk bercerai.[16]

Itulah beberapa permasalah yang dialami para TKI/TKW dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dengan permasalahan yang ada masih banyak para petani yang lebih emilih menjadi TKI/TKW walaupun mengetahui resiko yang akan dijalani.

C. PILIHAN RASIONAL JAMES S. COLEMAN

Dalam Penulisan ini menggunakan teori Pilihan Raional James S. Coleman. Teori Pilihan Rasional secara umum berada pada posisi marginal

[16] Herry Nur Faisal, Pengaruh Latar *Belakang* Petani Beralih Profesi Mata Pencaharian Menjadi Buruh Migran (TKI/TKW) (Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.2 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam arus utama teori sosiologi. Teori pilihan rasional menjadi salah satu teori "panas" dalam sosiologi kontemporer.

Coleman berargumen bahwa sosiologi seharusnya memusatkan perhatian pada sistem sosial namun fenomena makro tersebut harus dijelaskan oleh faktor di dalamnya, dengan individu sebagai prototepinya. Ia lebih suka bekerja pada level ini karena beberapa alasan, termasuk fakta bahwa biasanya data dikumpulkan pada level individu dan selanjutnya harus disusun agar berkembang pada level sistem. Di antara alasan memilih fokus pada level individu adalah bahwa individulah tempat " intervensi" pada awalnya untuk menciptakan perubahan sosial. Inti perspektif Coleman adalah gagasan bahwa teori sosial tak hanya merupakan latihan akademis, tetapi harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui "intervensi" tersebut[17].

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa "tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan juga tindakan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)". Namun kemudian coleman berargumen bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, konsep yang melihat aktor memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan keuntungan, atau pemuasan kebutuhan dan keinginannya.

Ada dua elemen kunci dalam teorinya yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan aktor dan yang diinginkannya.

[17] George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Edisi Terbaru*, (Yogyakarta:Kreasi Wacana,2013),477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dua elemen ini, Coleman memerinci bagaimana interaksi keduanya mengarah pada level sistem :

Basis minimal bagi sistem tindakan sosial adalah dua aktor, yang masing-masing memiliki kontrol atas sumber daya kepentingan satu sama lain. Adalah kepentingan setiap orang akan sumber daya agar berada di bawah kontrol orang lain, yang bawa keduanya, sebagai aktor yang memiliki tujuan, terlibat dalam tindakan yang melibatkan satu sama lain. Satu sistem tindakan adalah struktur ini, bersama dengan fakta bahwa aktor memiliki tujuan, masing-masing memiliki tujuan untuk memaksimalkan realisasi kepentingannya, yang memeberikan karakter interdependen, atau karakter sistemis, kepada tindakan-tindakan mereka[18].

Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata orang tak selalu berperilaku rasional, tetapi ia merasa bahwa hal ini hampir tak berpengaruh pada teorinya. Ia berasumsi bahwa ramalan teoritis yang ia buat adalah untuk melihat apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas atau menyimpang dari cara-cara yang diamati (menyimpang dari rasionalitas).

Tindakan rasional individu dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan makro-mikro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Secara inti ia memusatkan perhatian pada aspek hubungan makro-mikro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lain. Salah satu kunci gerakan dari mikro ke makro adalah mengakui wewenang dan hak yang dimiliki oleh

[18]Ibid, 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang individu terhadap individu lain. Berdasarkan terapannya, Coleman tertarik pada diagnosis dan solusi atas masalah-masalah ini.

1. **Perilaku Kolektif** : Teori pilihan rasional dapat menganalisis perilaku kolektif, meskipun sifat perilaku kolektif tak stabil dan kacau. Teori pilihan rasional dapat menjelaskan penyebab adanya perilaku kolektif yang liar dari seorang atau beberapa aktor terhadap aktor lain. Menurut teori pilihan rasional, adanya perilaku yang demikian dikarenakan mereka berupaya memaksimalkan kepentingan mereka. Adanya upaya memaksimalkan kepentingan individual tersebut menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa aktor dan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, dalam perilaku kolektif, adanya upaya memaksimalkan kepentingan individu tak selalu menyebabkan keseimbangan sistem.
2. **Norma :** Menurut Coleman, norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang. Mereka memahami keuntungan dibentuknya norma tersebut, dan kerugian apabila terjadi pelanggaran terhadap norma. Aktor berusaha memaksimalkan utilitas mereka, sebagian dengan menggerakkan hak untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan memperoleh sebagian hak untuk mengendalikan aktor lain. Tetapi ada pula keadaan di mana norma berperan menguntungkan orang tertentu dan merugikan orang lain. Dalam kasus tertentu, aktor menyerahkan hak (melalui norma) untuk mengendalikan tindakan orang lain. Selanjutnya keefektifan norma tergantung pada kemampuan melaksanakan consensus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Konsensus dan pelaksanaannyalah yang mencegah tanda-tanda ketidakseimbangan perilaku kolektif.

3. **Aktor Korporat :** Dengan kasus norma, Coleman bergerak ke levelmakro, dan melanjutkan analisisnya pada level ini ketika membahas aktor korporat. Dalam suatu kelompok kolektif, aktor tidak dapat bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama.

   Ada berbagai aturan dan mekanisme agar dapat berpindah dari pilihan individu menuju pilihan kolektif. Coleman beragumen bahwa aktor korporat dan aktor manusia memiliki tujuan. Terlebih lagi dalam struktur korporat seperti organisasi, aktor manusia bisa mengejar tujuan mereka yang berbeda dengan tujuan korporat.

   Sebagai seorang teoritisi pilihan rasional, Coleman mulai dari individu dan dari gagasan bahwa semua hak dan sumber daya tersedia pada level ini. kepentingan individu menetukan seluruh peristiwa. Didunia modern aktor korporat semakin penting.

   Bagi Coleman, perubahan sosial terpenting adalah munculnya aktor korporat untuk melengkapi aktor "pribadi alami". Keduanya dipandang sebagai aktor karena "mengontrol sumber daya dan peristiwa, kepentingan akan sumber daya dan peristiwa, serta kapabilitas untuk bertindak merealisasikan kepentingan – kepentingan tersebut melalui control".

   Coleman membedakan struktur primordial yang didasarkan pada keluarga, dengan struktur yang bertujuan. Struktur primordial mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegagalan ketika fungsi–fungsi mereka mulai tersebar dan diambil alih oleh aktor korporat. Sehingga tujuan karya Coleman adalah memberikakan landasan bagi konstruksi struktur sosial yang layak dilakukan, ketika struktur primordial tempat bergantung orang mulai punah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id